

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Arens, et al. (2010:7) menjelaskan yang dimaksud dengan akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan, para akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar menyiapkan informasi akuntansi, selain itu akuntan juga harus mengembangkan suatu system untuk dapat memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dari entitas yang bersangkutan dicatat tepat waktu dengan biaya yang wajar.”

Menurut Mulyadi (2014:11) menjelaskan yang dimaksud dengan akuntansi adalah:

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain.”

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independensi guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan *auditing* disebut dengan auditor. Pengertian *auditing* semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan *auditing*.

Menurut Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4) menjelaskan pengertian yang dimaksud dengan audit adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Artinya *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten serta independen.

Menurut Sukrisno Agus (2013:4), Pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan pengertian audit Menurut Mulyadi (2014:9) Pengertian Auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkemungkinan.”

Sedangkan menurut Timothy J. Louwers, et al. (2013:4) mendefinisikan *auditing* adalah:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksiharan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberi keyakinan kepada (*Stakeholders*) bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. (Restu Agusti,2013)

Berdasarkan definisi-definisi auditing di atas dapat disimpulkan beberapa hal terpenting terkait dengan auditing, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Proses pemeriksaan yang kritis dan sistematis untuk memperoleh hasil audit yang baik dilakukan oleh pihak yang profesional, berkompeten dan intergritas serta serta independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemerksaan tersebut bertjuan untuk meneapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat membrikan informasi yang relevan serta dapat dimanfaatkan oleh para (*Stakeholders*).

2.1.2.2 Jenis- Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:16-19) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedeur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem computer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, review atau penelahaan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada penggunaan luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh Karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Oleh karena perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup auditor untuk hanya berfokus kepada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.”

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit Operasional (*Operational Audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dari laporan keuangan dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku umum.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Auditor

Ada beberapa jenis auditor dewasa ini yang berpraktik, jenis yang paling umum adalah KAP, Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah, Auditor Pajak, Dan Auditor Internal. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasankan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:19-21) Jenis-Jenis Auditor dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang di publikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak

perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil, oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah di audit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan public dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutkan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Harus memiliki lisensi sebagai Akuntan Publik. KAP sering kali disebut Auditor Eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan Auditor Internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang menerka untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP memperkejakan lebih dari 4000 orang auditor di seluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang berkeja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh kepala

BPK melapor dan bertanggung jawab lainnya seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintahan baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan kepada audit ketaatan.

4. Auditor Pajak

Bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut Auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung kepada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi auditor internal tidak dapat

sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Kantor Akuntan Publik dituntut untuk lebih akuntabel dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Tanpa adanya prinsip akuntabilitas maka kesimpulan yang dibuat tidak dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan/instansi berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan.

Pengertian Akuntabilitas secara umum menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.”

Menurut Teclock (1987) dalam Diana dan Ria (2007) mendefinisikan Akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Prasyarat utama mewujudkan Akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah Elisha dan Icuk (2010)

Sedangkan menurut Supardi dan Mutakin (2008) menyatakan bahwa rasa bertanggungjawab atau akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesimpulan yang dapat dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah keadaan dimana seseorang mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan.

2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Aspek-aspek yang mendukung timbulnya prinsip akuntabilitas menurut Robbins (2008) dalam Elisha dan Icuk (2010) dapat dilihat dari motivasi, pengabdian pada profesi, kewajiban sosial. Berikut penjelasannya yaitu:

1. Motivasi

Motivasi adalah dorongan pada diri seseorang yang menimbulkan suatu

Suatu keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau tingkah laku untuk mencapai tujuan. Auditor yang berkualitas memiliki motivasi yang tinggi.

Dengan motivasi yang tinggi, seorang auditor akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Menurut Robbins (2008:222) Elemen utama dalam motivasi adalah:

- a. Intensitas, berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha.
- b. Ketekunan, ukuran mengenai berapa lama seseorang mempertahankan usahanya.

2. Pengabdian pada Profesi

Pengabdian pada profesi seorang auditor merupakan dedikasi auditor terhadap pekerjaannya yang dilakukan secara professional dan total dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.

Professional dan totalitas pekerjaan tidak memprioritaskan materi.

Menurut Robbins (2008) dalam Elisha dan Icut (2010), pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seseorang professional, tanpa paksaan dari siapapun, dan secara sadar bertanggungjawab terhadap profesinya.

Indikator pengabdian terhadap profesi dalam IAI:

a. Tanggung jawab profesi

Prinsip tanggung jawab profesi menyatakan bahwa sebagai professional, anggota IAI mempunyai peranan penting dalam masyarakat terutama kepada semua pemakai jasa profesional mereka dan bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi akuntansi.

b. Penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan.

c. Menjalankan setiap program kegiatan profesi.

Setiap anggota profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi serta mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi.

3. Kewajiban Sosial

Kewajiban social merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Dari definisi tersebut didapatkan indikator kewajiban social bagi auditor yaitu:

a. Pelayanan kepentingan publik

Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan

kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

b. Integritas

Prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik.

c. Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya. Anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

2.1.3.3 Bentuk-bentuk Akuntabilitas

2.1.3.3.1 Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2006:21) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

“1. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas kegiatan

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akutabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat.”

Tuntunan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).

2.1.3.3.2 Akuntabilitas Auditor

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor. Peran dan tanggungjawab diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2011:305-306) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ataupun Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standard Boards (ABS). Peran dan tanggungjawab auditor adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan dan ketidakberesan.

Dalam SPAP (seksi 316) pendeteksikan terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva.

2. Tanggung jawab sikap independensi dan menghindari konflik.

SPAP (seksi 220) harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik.

3. Tanggungjawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.

SPAP (seksi 341) menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan.

4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

SPAP (seksi 317) memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan.

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Mc Acshan dalam Edy Sutrisno (2010:203) memberikan pengertian kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”.

Menurut Iskandar Indranata (2006:36) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik yang bisa dibuktikan atau diperagakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”.

Standar umum pertama (IAI, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*Knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Menurut Alvin A. Arens et. All (2013:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan”.

Menurut Fitrawansyah (2014:46) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya”

Menurut Siti Kurnia & Ely Suhayati (2010:2) memberikan pengertian kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang di butuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut Tuanakotta (2011), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Pada awal lahirnya profesi ini, persyaratannya masih sederhana. Dengan berkembang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin kompleksnya dunia usaha, persyaratan menjadi auditor akan semakin ketat. Christiawan (2002) dan Alim, Hapsari, Purwanti (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Pengelolaan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan merupakan investasi yang mahal, tetapi sangat menentukan. KAP peringkat teratas mengeluarkan banyak sumber daya (uang dan waktu) untuk meningkatkan kemahiran auditornya, artinya dalam melaksanakan audi diperlukan sikap kompeten dimana didalamnya harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.

2.1.4.2 Sudut Pandang Kompetensi

Menurut De Angelo (1981) dalam Law Tjun Tjun (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni:

1. Sudut pandang auditor individual

2. Sudut pandang audit tim
3. Sudut pandang Kantor Akuntan Publik (KAP)

Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail berikut ini:

1. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan

tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis&Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan prosentse dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (missal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al. 1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP kecil.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.4.3 Dimensi Kompetensi Auditor

Menurut A.Arens (2013: 42) terdapat 3 macam komponen kompetensi auditor yaitu:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan akuntansi akan memudahkan profesi akuntan publik dan laporan pengauditan jika mereka memahami konsep yang melatarbelakangi penyusunan laporan pengauditan, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup, pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang dikuasainya dan dapat mengetahui berbagai macam masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

b. Pengalaman

Dalam standar umum pertama poin ketiga audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman.

Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal:

1. Mendeteksi kesalahan
2. Memahami kesalahan secara akurat
3. Mencari penyebab kesalahan

Hasilnya menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka terhadap kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesalahan yang ditentukan. Kompetensi dalam audit dan akuntansi diantaranya termasuk pelatihan dan pengalaman yang memadai dalam semua aspek dari pekerjaan seorang auditor. Bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

c. Pendidikan Profesional

Auditor ditekankan untuk mengikuti pendidikan profesional program akuntansi untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti ide-ide terbaru dan teknik dalam audit dan akuntansi. Auditor diharapkan memiliki ketiga pelatihan akademik di bidang akuntansi, perpajakan, audit dan yang lainnya yang berkaitan dengan profesi mereka. Selain itu mereka harus menerima pelatihan lebih lanjut, baik formal maupun informal, sepanjang karier mereka. Pencapaian keahlian sendiri dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal. Persyaratan

sebagai profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan berkelanjutan.

2.1.4.4 Standar Kompetensi

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:36) mendefinisikan integritas adalah : Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

- a. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan).
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Rendal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi (2011:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku”.

Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menjelaskan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing”.

Menurut Nasrullah Djamil (2005) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal dan kegagalan audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material. Untuk

meningkatkan kualitas audit maka harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit”.

Gaspersz yang dikutip oleh L. Fariha, U. Nurmaida, D. Askanovi, R. Aditya dan V. M. Amalia dalam Buletin Manajemen Mutu dan Industri Pangan (2011) mendefinisikan kualitas adalah sebagai berikut:

“Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan”.

Seorang auditor harus memiliki kualitas audit agar hasil laporan keuangan yang menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Agar hasil audit lebih berkualitas, Indra Bastian (2007:186) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Bahwa kualitas audit harus dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya”.

De Angelo dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi),

sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor”.

Agar tidak keliru menafsirkannya, maka perlu meninjau definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip dalam R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (2006:314) mendefinisikan kualitas adalah sebagai berikut:

“Kadar, mutu, tingkat baik buruknya suatu (tentang barang dsb), tingkat derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dsb”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas terkait dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini yaitu laporan audit. Profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit ini auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.5.2 Dimensi Kualitas Audit

Menurut Bedard dan Michelene dalam Andri Hardiansyah (2017) ada dua pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:

1. *Process Oriented*
2. *Outcome Oriented*

Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan diatas yaitu:

1. Proses *Oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil yang di observasi yaitu laporan audit.

Terdapat 4 fase dalam kriteria pemenuhan tujuan-tujuan audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2011:130-134) dalam Amir Abadi Jusuf .

1. Fase 1 : Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Untuk setiap pengauditan , terdapat banyak cara yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan audit keseluruhan dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan. Rencana iu haruslah menghasilkan sebuah pendekatan audit yang efektif, terdapat 3 cara yaitu:

- a. Mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya
- b. Memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian
- c. Menilai resiko salah saji material

2. Fase 2. : Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi

Prosedur semacam ini secara umum mengacu pada pengujian atas pengendalian. Sebagai contoh, anggaplah pengendalian internal klien memerlukan verifikasi oleh seorang petugas independen terhadap semua harga penjualan satuan sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan.

Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit. Akurasi terhadap penjualan, auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan untuk dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan perunit itu sudah diverifikasi.

Auditor juga mengevaluasi catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi, proses ini disebut tes substantif terhadap transaksi, contohnya auditor dapat membandingkan harga perunit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sebagai bentuk pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi penjualan.

3. Fase 3 : Melakukan Prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterikatan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Sebagai contoh, untuk mendapatkan akurasi transaksi, auditor dapat memeriksa transaksi penjualan dalam jurnal penjualan, khususnya yang nilainya sangat besar dan tidak biasa dan juga membandingkannya dengan total penjualan bulanan di tahun sebelumnya. Jika perusahaan terus menerus menggunakan harga jual yang salah atau tidak mencatat penjualan dengan benar, maka kemungkinan akan muncul perbedaan yang signifikan.

Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nominal saldo akun di laporan keuangan. Sebuah contoh terkait keakuratan atas akun piutang dagang adalah dengan melakukan komunikasi langsung secara tertulis dengan para pelanggan klien untuk mengidentifikasi jumlah yang benar. Pengujian terinci atas saldo akhir merupakan hal penting dilakukan dalam pengauditan karena hampir semua bahan bukti didapatkan dari narasumber klien yang independen sehingga bahan bukti ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi.

4. Fase 4 : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena bergantung pada penilaian profesional auditor. Ketika audit telah diselesaikan, seorang akuntan public harus menertibkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien.

2. *Outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Kualitas Keputusan Audit diukur dengan :

- a. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Tipe Standar Profesional terdiri atas 5, diantaranya : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, Standar Pengendalian Mutu. Kelima Standar Jasa Profesional diatas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Seorang akuntan publik dikatakan berkualitas atas jasa yang diberikan jika ia memenuhi dan mentaati pedoman yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik oleh seorang auditor wajib dilakukan dari mulai proses hingga hasil laporan audit.
- b. Tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu
Menurut Solomon et.al dalam Hilda Rossieta (2009) menemukan bahwa spesialis biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan dibanding dengan auditor non spesialis. Menurut Balsam dan Krishan (2003) dalam Hilda Rossieta (2009) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki nilai akrual diskrisioner yang lebih kecil dan *earning response coefficients* yang lebih besar pada saat pengumuman laba. Auditor memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik mengenai *internal control* perusahaan, resiko

bisnis perusahaan, dan resiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.

2.1.5.3 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.

Menurut Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) menjelaskan bahwa terdapat lima elemen pengendalian kualitas, yaitu:

“1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Semua fenomena yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam kantor akuntan publik, kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa:

- a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.

- b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis secara cukup serta memiliki kecakapan.
- c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam melaksanakan pendidikan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.
- d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung jawab dalam penyusunan berikutnya.

3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan kerjasama dengan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah.

4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan mutu KAP sendiri.

5. Pemantauan Prosedur

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif⁷.

IAPI menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing tersebut meliputi (SPAP, 2011:150.1):

“A. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain.

Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan

2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dies dan Giroux (1992) dalam Alim dkk (2007) tentang empat faktor yang dapat mempengaruhi audit, yaitu:

1. “Tenure

Lama waktu audit yang telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenur), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.

2. Jumlah klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3. Kesehatan keuangan klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.

4. Review oleh pihak ketiga

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh orang ketiga”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Manajemen perusahaan dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik perusahaan. Manajemen harus menyusun laporan keuangan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemilik perusahaan. Agar laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan akurat dan tidak mengandung salah saji maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal sebelum informasi laporan keuangan tersebut digunakan oleh pemilik dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Peran auditor dibutuhkan untuk memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dicapai jika auditor eksternal memiliki salah satu elemen penting kendali mutu audit yaitu independensi dan objektivitas (Nor Rasyid Widodo 2012).

Dalam menghasilkan Kualitas Audit yang akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka auditor tersebut harus memiliki beberapa sikap sebagai dasar dalam mengambil keputusan kegiatan auditnya. Sikap yang harus dimiliki auditor tersebut antara lain Independensi, Kompetensi dan Akuntabilitas.

Auditor eksternal bergabung dalam Kantor Akuntan Publik dan diberi kepercayaan besar oleh manajemen perusahaan, pemilik perusahaan dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka. Jasa audit atas laporan keuangan yang diselesaikan oleh auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar teknis yang mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Salah satu standar teknis audit tersebut yaitu standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor, tanpa adanya sifat akuntabilitas dari auditor maka setiap tugas yang dilaksanakan tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang sebenarnya.

Menurut Teclock (1987) Dalam Diana dan Ria (2007) menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Lilis Ardini (2010) menjelaskan bahwa:

“Tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan yang akan diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin dengan penuh tanggungjawab akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas”.

Aspek-Aspek yang mendukung dari Robbins (2008:222) dalam Elisha dan Icuik (2010) dapat di lihat dari Motivasi, Pegabdian pada profesi, Kewajiban sosial

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Alvin A. Arens et. All (2013:42) menjelaskan bahwa:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan”.

Menurut Siti Kurnia & Ely Suhayati (2010:2) menjelaskan bahwa:

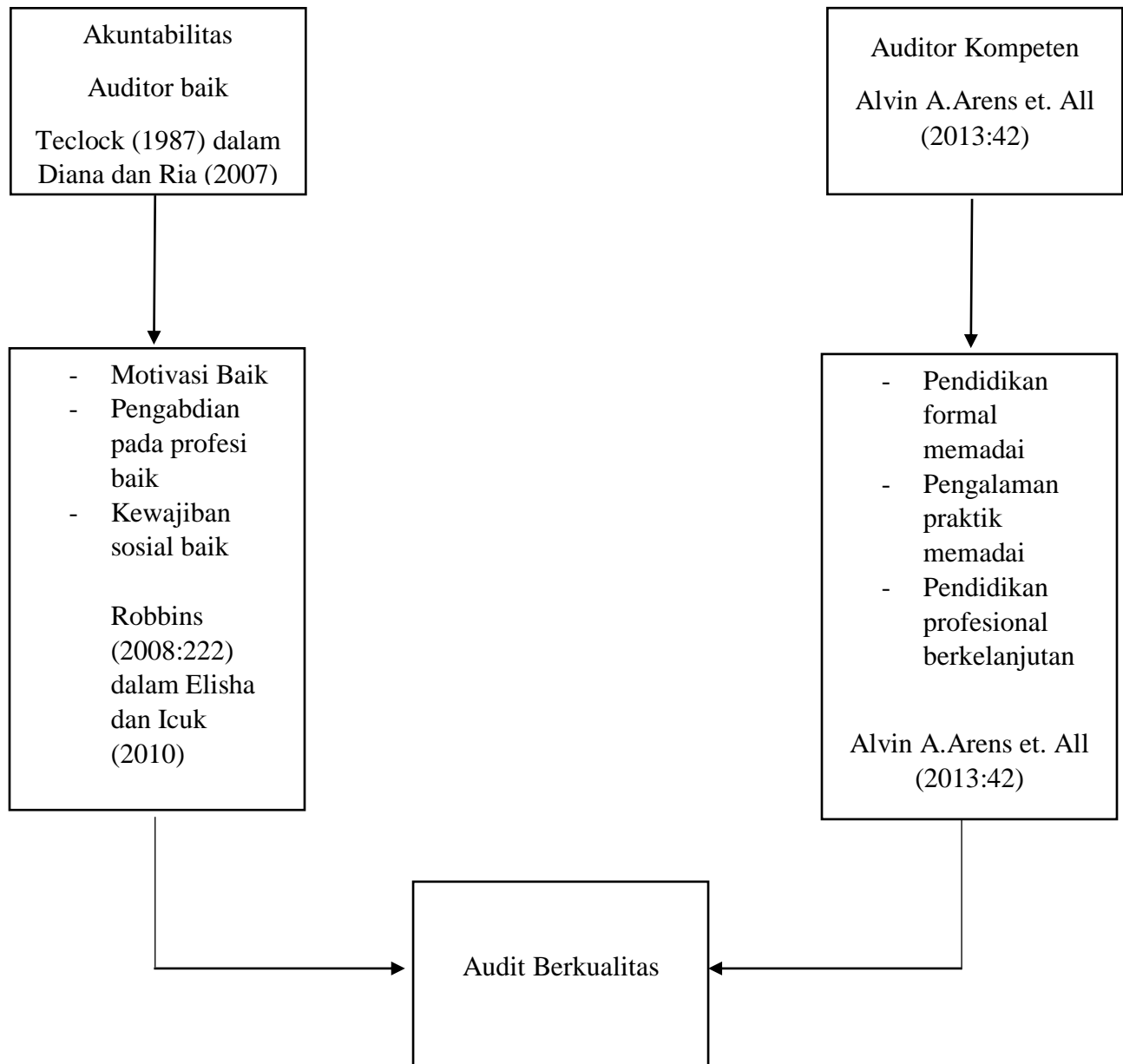
“Kompetensi adalah Suatu kempuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan perpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang di butuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut Alvin A.Arens et. All (2013:42) terdapat 3 macam komponen kompetensi auditor yaitu : Pendidikan formal, Pengalaman, Pendidikan Profesional

2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Nugrahaningsih (2005) dalam Alim dkk (2007) mengatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka berlindung, profesi mereka, masyarakat dan pribadi mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan berusaha menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Akuntabilitas Auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₂ = Kompetensi Auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₃ = Akuntabilitas Auditor dan Kompetensi Auditor secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eunike Cristina Elfarini (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi. Variabel Dependen: Kualitas Audit	Kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan

				terhadap kualitas audit.
2.	Nataline (2007)	Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus dan Pengalaman Kerja. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Batasan waktu audit, pengetahuan audit, pemberian bonus dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3.	Sukriah, dkk (2009)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.	Variabel Independen: Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi. Variabel Dependen: Kualitas Hasil Pemeriksaan.	Pengalaman kerja, obyektivitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan.
4.	Elisha Muliana Singgih dan Icuik Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas. Variabel Dependen:	Independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh

			Kualitas Audit.	terhadap kualitas audit. Selain itu secara parsial, independensi, due professional care dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor.	Variabel Independen: Akuntabilitas dan Pengetahuan. Variabel Dependen: Kualitas Hasil Kerja Auditor.	Akuntabilitas dan pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja auditor.
6.	Inka Dwi Anggraini (2014)	Pengaruh Kompetensi Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Kompetensi dan Akuntabilitas. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Kompetensi dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan penulis :

1. Eunike Cristina Elfarini (2007) tentang “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit di KAP Jawa Tengah”. Dalam penelitian tersebut objek penelitian yaitu KAP Jawa Tengah sedangkan penulis di KAP Kota Bandung. Variabel bebas dalam penelitian terdahulu adalah kompetensi dan independensi, sedangkan penulis kompetensi dan akuntabilitas. Persamaan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik *Proporsional Simple Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Nataline (2007) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit pada KAP”. Variabel independen adalah batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi, pemberian bonus, pengalaman kerja sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, penulis hanya menggunakan kompetensi di variabel bebasnya sedangkan persamaan variabel dalam penelitian terdahulu dengan penulis yaitu kualitas audit di variabel terikatnya.

3. Sukriah, dkk. (2009) juga melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi. Sedangkan variable terikatnya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah ada pengurangan variabel di variabel bebas dan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu menggunakan kompetensi di variabel bebas dan kualitas audit di variabel terikat.
4. Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010) meneliti dengan judul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP “Big Four” di Indonesia)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu ada pengurangan variabel dan penulis hanya menggunakan akuntabilitas di variabel bebas dan yang menjadi objek penelitian adalah KAP di kota bandung sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu kualitas audit di variabel terikat.
5. Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007) meneliti dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi pada KAP di Kota Pekanbaru & Padang)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu objek penelitian penelitian terdahulu objek penelitiannya di KAP Kota Pekanbaru & Padang

sedangkan penulis KAP di Kota Bandung sedangkan persamaan Penelitian terdahulu dengan penulis yaitu akuntabilitas di variabel bebas.

6. Inka Dwi Anggraini (2014) meneliti dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu survey pada objek penelitian tahun 2013 sedangkan penulis tahun 2016 sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu memiliki persamaan di variabel bebas dan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas audit.